



UIN SUMATERA UTARA MEDAN

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUMATERA UTARA M E D A N

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH: Ilmu Perundang-Undan gan OTORISASI	KODE MATA KULIAH: 010203207 DOSEN PENGEMBANG RPS: Putri Eka Ramadhani Batubara, SH, M.Hum	RUMPUN MATA KULIAH: Keprodian KOORDINATOR RMK: Dr. Khalid, S.Ag., SH., M.Hum	BOBOT (SKS): 2 SKS	SEMESTER: 4	TANGGAL PENYUSUNAN: 28 Agustus 2023 Kaprodi Dr. Khalid, S.Ag., SH., M.Hum
CAPAIAN PEMBELAJARAN Catatan:	CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri ; 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri dan bermutu ; 3. Mampu berkomunikasi secara efektif secara verbal maupun menggunakan teknologi ; 4. Mampu mengintegrasikan keilmuan Peraturan Perundang-undangan ; 5. Mampu berpikir kreatif dan inovatif ; 			
	CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Pengertian, Istilah, Pembagian Ilmu Perundang-undangan; 2. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Norma-norma Hukum dan Teori-teori dan Tata Urutan atau Hierarki Peraturan Perundang-undang; 3. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Lembaga-Lembaga Negara Yang Berwenang Membuat Perundang-Undangan 4. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Asas-Asas, Prinsip-Prinsip, Fungsi Peraturan Perundang-undangan 5. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Jenis, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 			

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Sistematika dan Kerangka Peraturan Perundang Undangan 7. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Bahasa Peraturan Perundang-Undangan 8. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan UU 9. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Proses dan mekanisme pembentukan Peraturan pemerintah pengganti undang undang 10. Mahasiswa mampu untuk dapat menyusun dan merancang peraturan perundang-undangan sesuai denganketentuanyang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 11. Mahasiswa dapat memahami proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik ditingkat Pusat maupunDaerah. 12. Mahasiswa dapat memahami konsep, tujuan, manfaat, metode dan proses penyusunan Naskah Akademiksertamampu menyusun naskah akademik. 13. Mahasiswa dapat memahami teknik penyusunan bentuk luar dan isi peraturan perundang-undangan; 14. Mahasiswa dapat membuat draft rancangan peraturan perundang-undangan. 15. Mahasiswa dapat mengetahui praktek pembentukan peraturan perundang-undangan serta mengetahui kendala-kendalalapangan yang dihadapi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan 16. Mahasiswa dapat mengetahui Proses dan mekanisme pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 17. Mahasiswa dapat memahami ketentuan dan tata cara perubahan dan pencabutan perundang-undangan
--	--	---

DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH:	Ilmu perundang-undangan merupakan mata kuliah kemahiran yang menekankan aspek keterampilan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. dan memberikan pemahaman tentang konsep dasar tentang penyusunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang naskah akademik hasil kajian ilmiah beserta naskah awal peraturan perundang-undanganyang diusulkan.
MATERI PEMBELAJARAN/ POKOK BAHASAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian, Istilah, Pembagian Ilmu Perundang-undangan; 2. Norma-norma Hukum dan Teori dan Tata Urutan atau Hierarki Peraturan Perundang-undang 3. Lembaga-Lembaga Negara Yang Berwenang Membuat Perundang-Undangan 4. Asas-Asas, Prinsip-Prinsip, Fungsi Peraturan Perundang-undangan 5. Jenis, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 6. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat; 7. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah.

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan 9. Sistematika Dan Kerangka Peraturan Perundang Undangan 10. Teknik-Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 11. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan UU 12. Proses dan mekanisme pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang (PERPPU). 13. Ketentuan dan Tata Cara Perubahan dan Pencabutan Peraturan Perundang-Undangan 14. Pengujian Peraturan Perundang-undangan
PUSTAKA	UTAMA
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arief Sidharta , Pembentukan Hukum Di Indonesia, Makalah Kuliah Filsafat Hukum Pascasarjana UNPAD, 2005 2. HAS Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia,, Konpress dan Tatanusa, Jakarta, 2008 3. Hamid S. Attamimi,, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV, Disertasi, Pascasarjana, Jakarta, 1990 4. Jimly Assiddiqie, Perihal Undang-undang, Konpress, Jakarta, 2006.
	PENDUKUNG
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta Amandemennya 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah 3. Peraturan DPR No. 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas 4. Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang 5. Peraturan DPR Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penarikan Rancangan Undang-Undang 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan. 7. Permendagri No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah
MEDIA PEMBELAJARAN	Powerpoint, MS Word, White Board, Buku Refrensi
TEAM TEACHING	-
MATA KULIAH SYARAT	-

MINGGU KE	SUB CPMK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1-5	a. Urgensi Ilmu Perundang-undangan; b. Penjelasan Silabus dan SAP; c. Kontrak Belajar; dan Pembentukan Kelompok.	a. Mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya Ilmu Perundang-undangan. b. Mahasiswa dapat menyesuaikan diri dengan pola pembelajaran Perancangan Peraturan Perundang-undangan.	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk nontest: Presentasi & Diskusi	Ceramah & Diskusi	Pengantar dan Pendahuluan Tinjauan Umum Tentang Peraturan Perundang-undangan (Pengertian, Istilah, Pembagian Ilmu Perundang-undangan)	5%
	a. Norma-norma Hukum dan b. Teori Perundang-undangan c. Tata Urutan atau Hierarki Peraturan Perundang-undang	Mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan Norma-norma Hukum dan Teori serta Tata Urutan atau Hierarki Peraturan Perundang-undang	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk nontest: Presentasi & Diskusi	Tanya Jawab	Teori dan Tata Urutan atau Hierarki Peraturan Perundang-undang	10%
	Mahasiswa Dapat Menjelaskan Lembaga-Lembaga Negara Yang Berwenang Membuat Peraturan-Undang an	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Lembaga-Lembaga Negara Yang Berwenang Membuat Peraturan- Undang an	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk nontest: Presentasi & Diskusi	Tatap Muka Diskusi Tanya Jawab	Lembaga-Lembaga Negara Yang Berwenang Membuat Peraturan-Undang an	5%
	a. Asas-asas Peraturan Perundang-undangan	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Asas-Asas, Prinsip-Prinsip, Fungsi	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi		Asas-Asas, Prinsip-Prinsip, Fungsi Peraturan Perundang-undangan	5%

MINGGU KE	SUB CPMK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	b. Prinsip-prinsip Peraturan Perundang-undangan c. Fungsi Peraturan Perundang-undangan	Peraturan Perundang-undangan	Bentuk non - test: Presentasi & Diskusi	Tatap Muka Tanya Jawab		
6-7	a. Jenis Peraturan perundang-undangan b. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Jenis dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk nontest: Presentasi & Diskusi	Tatap Muka Ceramah Tanya Jawab	Jenis, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan	20%
8	Ujian CPMK 1 & 2					
9-12	a. Tahap Persiapan Perancangan b. Tahap Pembahasan atau Pembicaraan di DPR c. Tahap Penetapan dan atau Pengesahan d. Tahap Pengundangan	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan bagaimana proses pembentukan peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk nontest: Presentasi & Diskusi	Tugas Terstruktur Mandiri	Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat;	10%

MINGGU KE	SUB CPMK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	a. Tahap Persiapan Perancangan b. Tahap Pembahasan atau Pembicaraan di DPRD c. Tahap Penetapan dan atau Pengesahan d. Tahap Pengundangan	a. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep, tujuan, manfaat, metode dan proses penyusunan Naskah Akademik. b. Mahasiswa mampu menyusun Naskah Akademik dengan baik	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk nontest: Presentasi & Diskusi	Ceramah Tanya Jawab Small group discussion	Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah.	5%
	a. Konsep, tujuan dan manfaat Naskah Akademik; b. Kerangka Naskah Akademik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; c. Metode dan proses penyusunan Naskah Akademik;	Mahasiswa dapat menyusun dan merancang teknik penyusunan perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan.	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk nontest: Presentasi & Diskusi	Tugas terstruktur Kelompok	Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	10%

MINGGU KE	SUB CPMK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13-15	a. Judul b. Pembukaan c. Batang Tubuh d. Penutup e. Penjelasan f. Lampiran	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan sistematika dan kerangka peraturan perundang-undangan dengan tepat dan jelas sesuai dengan aturan yang ada	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk nontest: Presentasi & Diskusi	Ceramah Small Group Discussion	Sistematika Dan Kerangka Peraturan Perundang Undangan	10%
	a. Kerangka Peraturan Perundang-undangan b. Hal-hal khusus c. Ragam bahasa peraturan perundang-undangan d. Bentuk Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Teknik- Teknik Penyusunan Rancangan Undang- Undang mulai dari tahap awal sampai dengan tahap akhir	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk nontest: Presentasi & Diskusi	Cooperative learning Guided learning Klarifikasi	Teknik-Teknik Penyusunan Peraturan Perundang- undangan	20%
16	Ujian CPMK 3 & 4					

Komponen Penilaian

Aspek	Persentase
Ujian CPMK 1	25%
Ujian CPMK 2	20%
Ujian CPMK 3	25%

Ujian CPMK 4	30%
Total	100%

Ketentuan lain: Kehadiran mahasiswa minimal 75% dan seluruh tugas dikumpulkan.

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:		Disahkan oleh:
Dosen Pengampu	<i>Penanggungjawab Keilmuan</i>	Ketua Program Studi  Dr. Khalid, S.Ag., SH., M.Hum	Dekan